

IDENTITAS

Copot Oknum Terlibat Pungli

TERTANGKAPNYA Kepala Pasar Sayang-Sayang, HM (53) dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang, MN (54) dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Unit Tipikor dan Resmob 701 Satreskrim Polres Mataram, membuat malu Pemkot Mataram. Baik Wakil Kepala Mataram, H. Ahyar Abdur maupun Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam banyak kesempatan senantiasa mengingatkan jajarannya untuk tidak melakukan pungli (pungutan liar) dalam bentuk apapun.

Nyatanya, peringatan dari orang nomor satu dan dua di Kota Mataram itu tidak diindahkan oleh jajaran mereka di bawah. Ini terbukti dengan terjaringnya kepala pasar dan wakilnya dalam OTT saber pungli. Apalagi ini bukan kasus pungli pertama yang terjadi di lingkup Pemkot Mataram. Sebelumnya, Tim Saber Pungli NTB berhasil melakukan OTT terhadap kepala seksi pada Dinas Perhubungan Kota Mataram, AM Rabu (11/1) malam. AM ditangkap karena diduga melakukan pungli retribusi parkir.

Dugaan pungli yang tidak kalah mengejutkannya adalah menyerang sektor pendidikan. Awal tahun 2017 ini, Tim Saber Pungli juga mengamankan Kepala SMPN 6 Mataram. Bahkan, kasus dugaan pungli yang dilakukan Kepala SMPN 6 Mataram kala itu, Lalu Marwan berlanjut ke meja hijau. Tidak hanya dicopot dari jabatan sebagai kepala sekolah, Lalu Marwan juga terpaksa menghadapi ancaman hukuman di persidangan yang hingga kini prosesnya masih berlangsung.

Artinya, dengan tiga kasus ini, semestinya menjadi bahan evaluasi Pemkot Mataram, baik Walikota, Wakil Walikota, Sekda maupun pimpinan SKPD bersangkutan. Tiga kasus ini menunjukkan indikasi terjadinya kemerosotan moral ASN (Aparatur Sipil Negara). Meskipun kasus ini tidak bisa menggeneralisir kemerosotan moral tersebut. Tetapi paling tidak, kasus pungli yang menyasar berbagai bidang itu dapat menjadi pelajaran bagi semua kalangan ASN, bahwa betapa, tindakan mereka yang mengambil keuntungan pribadi, berdampak luas.

Tidak saja dampaknya bagi oknum ASN bersangkutan, tapi juga pemerintah dan juga keluarganya. Tertangkapnya para ASN itu, sudah pasti mencoreng wajah Pemkot Mataram dan keluarga mereka. Apalagi mereka yang tertangkap itu merupakan kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan bagi istri dan anak-anak mereka. Untuk itu, kasus dugaan pungli Kepala Pasar dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang ini dapat menjadi pintu masuk bagi kepala daerah dan pimpinan SKPD untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap bawahannya.

Bila terbukti pungli, Kepala Pasar dan Wakil Kepala Pasar Sayang-Sayang harus dicopot dari jabatannya. Ini agar member efek jera bagi oknum ASN nakal dan bagi ASN lainnya agar tidak meniru pelanggaran yang dilakukan ASN nakal tersebut. Para pedagang tentu bersyukur dengan tertangkapnya pelaku pungli. Karena, sebelumnya, marak terdengar dugaan pungli yang terjadi di pasar-pasar tradisional.

Pelakunya tidak jauh-jauh dari aparat yang bertugas di pasar. Mulai dari kepala pasar, wakil kepala pasar maupun juru pungut. Kasus itu ibarat gunung es yang tidak bisa diselesaikan. Padahal, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berulang kali mengingatkan kepada pasar jangan sampai melakukan pungutan di luar retribusi. Akan tetapi, praktik ini tidak bisa terselesaikan hingga kini. Ironisnya, korban pungli itu adalah pedagang kecil yang belum tentu mendapat untung besar.

Untuk membersihkan citra Kota Mataram dari kasus pungli, oknum yang terbukti sebagai pelakunya harus diberhentikan dari jabatannya. Toh, masih banyak SDM lainnya yang layak mengantikannya. Hanya saja, dari awal, harus diberi peringatan, bila perlu pakta integritas agar dalam melaksanakan tugasnya tidak main-main. (*)

BUMDes dan Ekonomi Lokal

Oleh: Riza Multazam Luthfy

(Peneliti Desa. Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta)

Fungsi BUMDes bisa berjalan dengan baik dan maksimal, apabila filosofi kerja orang desa diperhatikan dan daya tawar (bargaining power) BUMDes dinaikkan. BUMDes dituntut menampung cara berpikir aktor penggeraknya. Sebagai garda terdepan dalam upaya pemanfaatan potensi desa, keberadaan BUMDes terkait erat dengan filosofi kerja orang desa

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) meresmikan

PT Mitra Bumdes Nusantara sebagai holding (induk) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menjalin ikatan kerja sama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Holding Bumdes diharapkan mampu mempercepat laju ekonomi perdesaan. Langkah ini membuktikan, Kemendesa PDTT menyadari bahwa BUMDes memiliki posisi urgensi dalam meningkatkan taraf hidup serta keadaan ekonomi orang desa.

Dikukuhkan melalui Peraturan Menteri No. 39 tahun 2010, BUMDes dipercaya memiliki fleksibilitas untuk selalu beradaptasi dengan keinginan masyarakat perdesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, BUMDes berupaya memajukan usaha-usaha perdesaan. Dengan demikian, BUMDes lebih mudah berperan selaku lembaga pembiayaan bagi mereka yang ingin meningkatkan usahanya di tingkat lokal. BUMDes menjadi alternatif pengelolaan potensi kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat yang berada di garis kemiskinan.

Keberlangsungan BUMDes bisa

lebih terpilih lantaran berdiri atas inisiatif masyarakat desa, dikelola serta dikontrol oleh masyarakat desa. Pemberdayaan BUMDes dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa dengan pola kehidupan yang kental dengan semangat gotong-royong. Pengawasan BUMDes berdasarkan norma sosial dan adat yang berlaku di desa tentu bisa meminimalisir perilaku menyimpang dalam kehidupan ekonomi perdesaan. Sebab ditopang oleh lembaga perekonomian yang dijuluki oleh semangat gotong-royong, kemandirian desa akan memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Sehingga, terwujudnya keadilan sosial sebagai pengamalan Pancasila dan terciptanya negara berdikari bukanlah utopia belaka (Sudjito, dkk. 2012: 335-336).

Ekonomi Kapitalistik

Lahirnya BUMDes di desa diharapkan mampu meminimalisir efek dan dampak negatif kapitalisme. Dengan memegang teguh visi kebersamaan dan loyalitas, BUMDes diyakini sanggup memerangi aktivitas ekonomi modern yang cenderung liberal-individual. Apalagi, nilai-nilai globalisasi yang menan-

cap sedemikian rupa di berbagai penjuru negeri genap melahirkan ekonomi kapitalistik.

Munculnya banyak mal tentu menggusur toko kecil, warung, dan kedai tradisional. Menjamurnya aktivitas pertambangan yang mengesampingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AM-DAL) mengotori alam perdesaan yang sejak lama jauh dari polusi. Dalam konteks inilah, peran BUMDes selalu dinantikan. Sepak terjang orang-orang yang aktif di dalamnya diharapkan mampu melakukan transformasi di tingkat lokal. Sehingga, aktivitas ekonomi tidak didikte oleh keinginan the have (orang kaya) dan pengusaha, tetapi diatur dengan prinsip tolongan monolog, kerukunan, serta komunitas.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir, kapitalisme yang mengusung ide-ide Barat menjadikan orang desa seakan terusir dari tanah kelahiran. Para konglomerat yang memperluas usahanya hingga pelosok turut memperparah penderitaan, kemiskinan, dan keterbelakangan desa. Kaum pengusaha yang sebenarnya dituntut memberikan peluang kerja bagi orang desa justerut ambil bagian dalam upaya menyengsarakan orang desa. Mereka selalu berusaha agar keuntungan yang mereka peroleh semakin

pedalaman mengantongi pola dan mekanisme tersendiri dibanding mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Apa yang mereka kerjakan genap dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman hidup. Inilah yang menyebabkan aktivitas ekonomi orang-orang desa berbeda dengan kaum urban.

Abdul Munir Mulkhan (2009: 95) mensinyalir bahwa orang desa memiliki filosofi kerja sendiri. Bagi mereka, kerja bukan sekadar berburu keuntungan atau kekayaan. Lebih jauh dari itu, kerja dianggap sebagai bagian dari cara menjalani kehidupan. Seluruh pekerjaan petani dan masyarakat perdesaan bukan dilandasi kesadaran bahwa mereka menganggap usaha utama dan sampingan sebagai bagian dari sistem produksi ekonomi. Apa yang mereka kerjakan merupakan cara untuk mengisi waktu kosong yang mesti dijalani sebagai bagian dari kehidupan rohani yang bermakna dan mendalam.

POJOK

- Pilih tunjangan transportasi, Dewan kembalikan 13 randis

- Aset daerah yang terancam mubazir

- Retail modern diduga pasang harga tak sesuai di kasir

- Harus diusut tuntas

Bang Sentil



Studio: Jl. Gajah Mada No.66 Kota Bima - NTB
Telp.0374-42906, Email: bimafm@yahoo.co.id
CP. 085253523401, 081333599793



Jl. Gajah Mada No.66 Kota Bima - NTB
email: citrabima_957@yahoo.co.id
Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111



Jln. Lintas Raya Puyung No.11 Kompleks KUD Jonggat Lombok Tengah
E mail : tara95_5fm@lombok@yahoo.co.id



Jl. Prof. M. Yamin Seruni 08 No.19 Selong - Lombok Timur - NTB
Tlp. 0376-22472 - SMS : 081 237 120 10
Http://scbsradio.co.cc

